

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

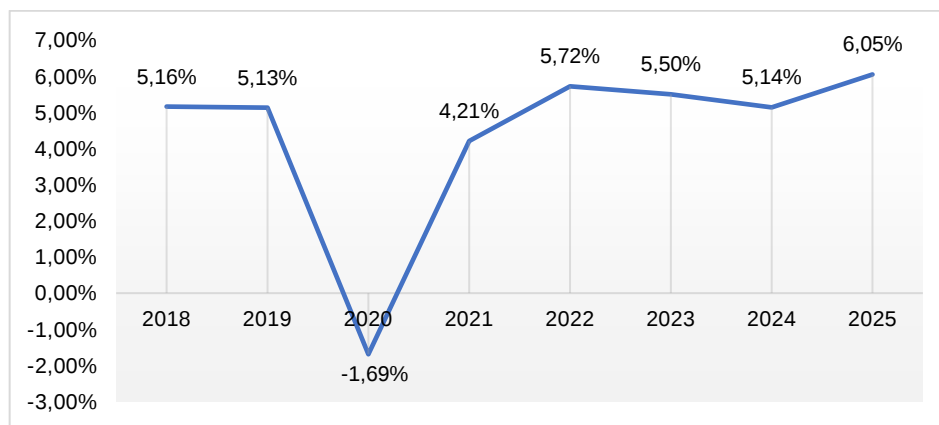
Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, perubahan struktur ekonomi, pemerataan pendapatan, serta perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dalam kajian ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan peningkatan output barang dan jasa dalam suatu periode tertentu yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah, sedangkan pembangunan ekonomi mencakup perubahan yang lebih menyeluruh karena juga menekankan aspek pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi (Budiman, 2025).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi apabila belum diikuti distribusi hasil pembangunan yang merata. Menurut Simon Kuznets dalam penelitian (Safitri et al., 2020), pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan sebelum akhirnya menurun ketika proses pembangunan mulai berlangsung lebih merata.

Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi ekonomi menuju negara maju yang tangguh, mandiri, dan sejahtera melalui strategi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi nasional menunjukkan dinamika yang cukup besar akibat pengaruh faktor domestik maupun global (Budiman, 2025). Pertumbuhan

ekonomi menjadi penting untuk diamati karena berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan. Perubahan kondisi ekonomi global maupun domestik turut memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga perkembangan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan perlu dianalisis untuk melihat stabilitas perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Indonesia (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2018–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun secara umum mencerminkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan global. Pola pertumbuhan yang terbentuk selama periode tersebut menggambarkan fenomena *V-shaped recovery*, yaitu penurunan tajam akibat krisis yang kemudian diikuti oleh proses pemulihan ekonomi yang relatif cepat dan stabil (Putri et al., 2025).

Pada periode pra-pandemi, yakni tahun 2018–2019, kondisi perekonomian Indonesia berada pada fase yang stabil. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,16% dan sedikit menurun menjadi 5,13% pada tahun 2019.

Stabilitas pertumbuhan di atas angka 5% menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih berjalan dengan baik, terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta stabilitas sektor keuangan nasional. Kondisi tersebut mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat sebelum terjadinya krisis kesehatan global.

Memasuki tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang sangat besar akibat pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi turun drastis hingga mencapai -1,69%, yang menandakan terjadinya kontraksi ekonomi. Penurunan ini dipicu oleh penerapan pembatasan aktivitas masyarakat, terganggunya rantai pasok global, menurunnya aktivitas produksi, serta melemahnya konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Pandemi menyebabkan hampir seluruh sektor ekonomi mengalami perlambatan, terutama sektor perdagangan, transportasi, pariwisata, dan industri pengolahan.

Pada periode 2021–2022, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan sebesar 4,21%, yang didorong oleh pelaksanaan program vaksinasi nasional, pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap, serta berbagai stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Widodo & Ardhiani, 2022). Pemulihan tersebut berlanjut lebih kuat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,72%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh membaiknya permintaan domestik dan meningkatnya harga komoditas global yang memberikan keuntungan besar bagi sektor ekspor Indonesia, khususnya komoditas pertambangan dan perkebunan.

Selanjutnya, pada periode 2023–2025, pertumbuhan ekonomi mengalami fase normalisasi. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi

5,50%, kemudian kembali turun menjadi 5,14% pada tahun 2024. Perlambatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tekanan geopolitik internasional, serta mulai menurunnya harga komoditas dunia setelah periode *commodity boom*. Meskipun demikian, kondisi ekonomi nasional tetap berada pada jalur pertumbuhan positif dan relatif stabil dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat signifikan hingga mencapai 6,05%, sekaligus menjadi angka tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa transformasi struktural ekonomi mulai memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan nasional. Kebijakan hilirisasi industri, penguatan investasi, percepatan transformasi digital, serta peningkatan produktivitas sektor manufaktur dan jasa menjadi faktor utama yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut.

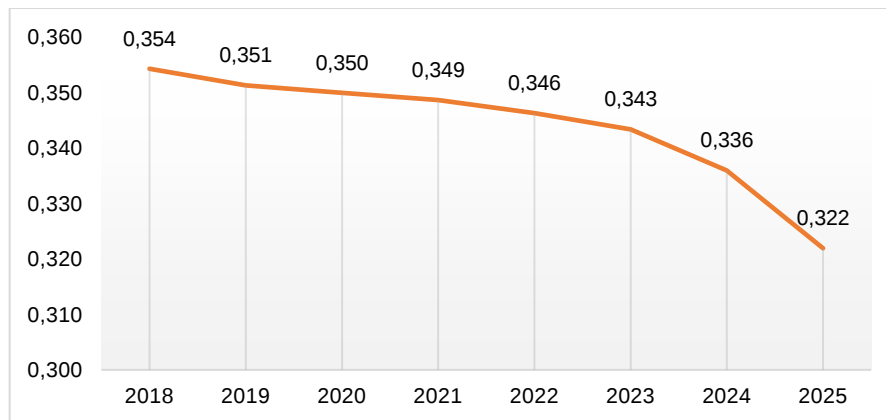
Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2018–2025 menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki tingkat resiliensi yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai guncangan eksternal. Meskipun sempat mengalami kontraksi tajam akibat pandemi Covid-19, Indonesia mampu melakukan pemulihan ekonomi secara cepat dan kembali mencatat pertumbuhan yang tinggi pada akhir periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional mulai bergerak menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif setelah periode krisis, peningkatan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Bank, 2020), pertumbuhan ekonomi yang

tinggi tidak selalu diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata, sehingga ketimpangan tetap dapat terjadi. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi sering disertai ketimpangan distribusi pendapatan, perbedaan akses terhadap layanan dasar, serta variasi tingkat kesejahteraan antarwilayah.

Hal ini sejalan dengan pandangan (Michael P. Todaro, 2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan output, tetapi juga dari pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara agregat, tetapi juga bersifat inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pembangunan juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan apabila pendapatan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang mampu menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, salah satunya melalui Gini Ratio yang menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan terjadi secara merata di dalam perekonomian nasional.

Gambar 1.2 Gini Ratio Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada Gambar 1.2, perkembangan Gini Ratio Indonesia selama periode 2018–2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pada periode awal pengamatan, yaitu tahun 2018–2021, tingkat ketimpangan pendapatan mengalami penurunan secara gradual. Tahun 2018 mencatat nilai Gini Ratio sebesar 0,354, kemudian menurun menjadi 0,351 pada tahun 2019. Penurunan berlanjut pada tahun 2020 menjadi 0,350 dan kembali turun menjadi 0,349 pada tahun 2021. Meskipun pada periode tersebut Indonesia menghadapi tekanan besar akibat pandemi Covid-19, tingkat ketimpangan relatif tetap terkendali dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial, bantuan sosial tunai, subsidi, serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan menahan pelebaran kesenjangan ekonomi selama masa krisis.

Selanjutnya, pada periode 2022–2025, penurunan Gini Ratio berlangsung lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Tahun 2022 mencatat penurunan menjadi 0,346, kemudian kembali turun menjadi 0,343 pada tahun 2023. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 0,336, dan mencapai titik terendah selama periode pengamatan pada tahun 2025 sebesar 0,322. Tren ini menunjukkan bahwa proses pemerataan pendapatan di Indonesia mengalami akselerasi yang cukup kuat pada fase pasca-pandemi (Jan et al., 2026).

Penurunan ketimpangan yang semakin tajam pada tahun 2024–2025 berjalan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif tinggi. Fenomena tersebut mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*inclusive growth*), yaitu pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan output ekonomi secara agregat, tetapi juga mampu mendistribusikan manfaat pembangunan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini didukung oleh peningkatan kesempatan kerja formal, membaiknya tingkat pendapatan masyarakat kelompok menengah ke bawah, serta dampak kebijakan hilirisasi industri dan transformasi ekonomi yang mulai menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai wilayah Indonesia (V. A. Sari & Dimova, 2024).

Secara keseluruhan, perkembangan Gini Ratio Indonesia selama periode 2018–2025 menunjukkan adanya keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi nasional. Penurunan indeks dari 0,354 pada tahun 2018 menjadi 0,322 pada tahun 2025 membuktikan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan ekonomi Indonesia mulai

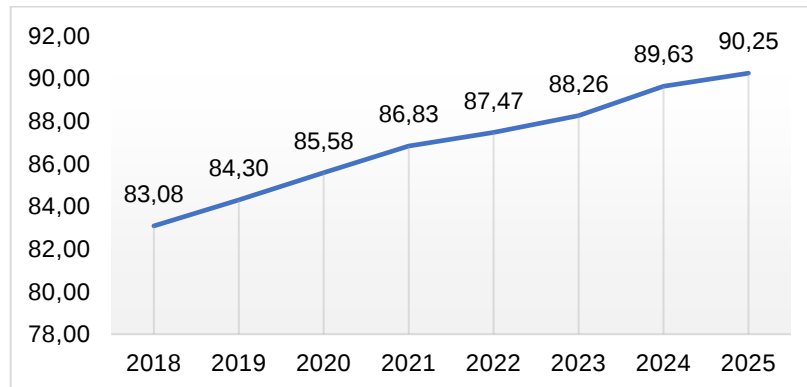
bergerak menuju pola pertumbuhan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi masih belum dinikmati secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang tetap ada dapat memengaruhi efektivitas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, sehingga diperlukan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat pemerataan pendapatan, akses kesempatan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan agar pembangunan menjadi lebih inklusif.

Pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan output, tetapi juga oleh tersedianya infrastruktur dasar yang mendukung kualitas hidup masyarakat (Endang et al., 2024). Infrastruktur dasar memiliki peran strategis karena menjadi fondasi dalam meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan efisiensi aktivitas ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang merata juga menentukan kemampuan setiap wilayah dalam menikmati hasil pembangunan secara seimbang, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan (Budiman, 2025). Salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan adalah belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar antarwilayah. Infrastruktur berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi karena memperlancar distribusi barang, jasa, dan mobilitas tenaga kerja. Salah satu indikator infrastruktur dasar yang relevan adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak (Simanjuntak et al., 2024).

Gambar 1.3 Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air

Minum Layak Indonesia (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

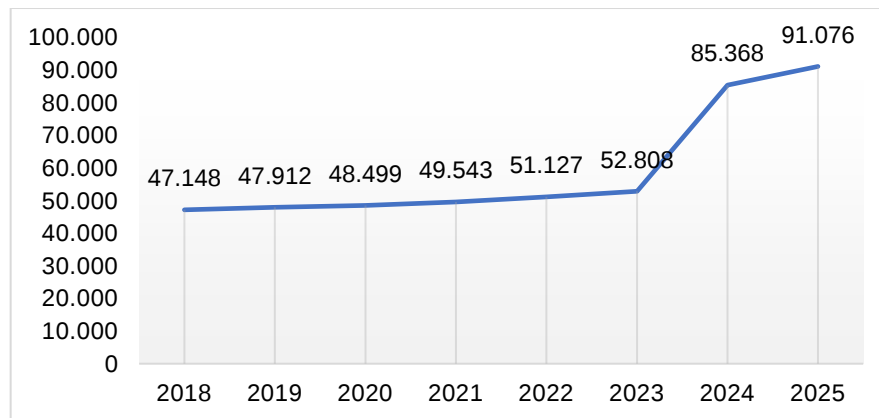
Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1.3, akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Indonesia selama periode 2018–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat secara konsisten. Pada awal periode pengamatan di tahun 2018, tingkat aksesibilitas berada di angka 83,08%. Melalui pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya, angka tersebut berhasil merangkak naik hingga mencapai 86,83% di tahun 2021, dan menyentuh 88,26% pada tahun 2023. Tren positif ini terus berlanjut hingga akhir tahun pengamatan (2025), di mana tingkat akses air minum layak di Indonesia berhasil mencatatkan angka tertinggi sebesar 90,25%.

Peningkatan konstan ini mencerminkan komitmen kuat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, di mana dalam kurun waktu delapan tahun, cakupan pelayanan air minum layak secara nasional telah meluas sebesar 7,17% yang mencerminkan adanya perbaikan layanan dasar dan perluasan infrastruktur air bersih di berbagai wilayah. Peningkatan ini didorong oleh pembangunan jaringan air minum, program sanitasi, serta intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman. Kenaikan yang konsisten juga menunjukkan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber air yang lebih aman untuk kesehatan,

meskipun masih terdapat tantangan pemerataan layanan terutama di wilayah terpencil dan perdesaan.

Keterbatasan infrastruktur dasar tersebut dapat menghambat produktivitas masyarakat, menurunkan kualitas hidup, dan memperbesar kesenjangan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif, karena akses layanan dasar yang lebih merata akan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan hasil pembangunan antarwilayah (Budiman, 2025).

Tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan wilayah tersebut dalam menghasilkan pendapatan rata-rata bagi penduduknya. Menurut (Michael P. Todaro, 2020), pendapatan per kapita merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator yang umum digunakan dalam konteks regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang menunjukkan besarnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk dalam suatu periode tertentu (BPS, 2023). Oleh karena itu, perkembangan PDRB per kapita perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana hasil pembangunan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat. Selain faktor infrastruktur, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi juga tercermin dari variasi PDRB per kapita, yang menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas ekonomi di masing-masing wilayah.

Gambar 1.4 PDRB Per Kapita ADHK 2010 Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 1.4, perkembangan PDRB per kapita Indonesia selama periode 2018–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat dengan pola pertumbuhan yang semakin ekspansif pada akhir periode pengamatan.

Pada periode 2018–2023, PDRB per kapita mengalami peningkatan secara bertahap dan relatif stabil. Tahun 2018 mencatat nilai sebesar 47.148 ribu rupiah, kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 52.808 ribu rupiah pada tahun 2023. Pola pertumbuhan yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi ekonomi nasional masih mampu tumbuh secara positif meskipun pada periode 2020–2021 perekonomian menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19. Stabilitas peningkatan PDRB per kapita selama periode tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan dan proses pemulihan ekonomi berlangsung secara gradual.

Memasuki periode 2024–2025, terjadi peningkatan yang jauh lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, PDRB per kapita melonjak tajam menjadi 85.368 ribu rupiah, kemudian kembali meningkat menjadi 91.076 ribu rupiah pada tahun 2025. Lonjakan ini menunjukkan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat serta peningkatan nilai tambah ekonomi secara agregat dalam waktu yang relatif singkat.

Peningkatan tajam PDRB per kapita pada periode akhir pengamatan mengindikasikan adanya perubahan struktural dalam perekonomian nasional maupun regional. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, lonjakan tersebut umumnya dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas sektor-sektor strategis, terutama sektor industri pengolahan, pertambangan, energi, serta percepatan investasi pada proyek-proyek berskala besar. Selain itu, implementasi kebijakan hilirisasi industri dan penguatan transformasi ekonomi digital turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan output ekonomi dan pendapatan masyarakat secara riil.

Fenomena peningkatan yang signifikan tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi dari sisi kuantitas output, tetapi mulai menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Kenaikan PDRB per kapita mencerminkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi per penduduk, sehingga dapat menjadi indikator positif terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat, peningkatan daya beli, serta bertambahnya peluang ekonomi pada berbagai sektor produktif.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan selama periode 2018–2025 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami transformasi yang cukup progresif. Meskipun sempat menghadapi tekanan akibat krisis global, perekonomian nasional mampu kembali tumbuh dengan akselerasi yang lebih tinggi pada akhir periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan ekonomi berjalan menuju arah yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas ekonomi masyarakat secara agregat. Meskipun demikian, (World Bank, 2022) menekankan bahwa peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarwilayah masih dapat terjadi dan berpotensi memengaruhi kemampuan masing-masing daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (E. L. Glaeser, 2013), pembangunan ekonomi yang tidak merata antarwilayah menyebabkan daerah dengan investasi dan infrastruktur lebih baik tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah tertinggal, sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita secara nasional belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang mampu memperkuat kapasitas ekonomi daerah secara lebih seimbang agar hasil pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh wilayah

Apabila kondisi ketimpangan pembangunan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur tersebut tidak ditangani secara tepat, maka konsekuensinya adalah semakin lebarnya disparitas ekonomi antarwilayah, rendahnya efektivitas pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatnya beban sosial pemerintah, serta terhambatnya upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang berlangsung dalam jangka panjang juga dapat menurunkan daya saing daerah tertinggal dan memperbesar ketergantungan wilayah terhadap pusat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Secara teoritis, hubungan antara infrastruktur, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan telah banyak dibahas dalam

literatur ekonomi pembangunan. (Straub, 2008) menyatakan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi. Selanjutnya, (Irmen & Kuehnel, 2009) menjelaskan bahwa investasi pada infrastruktur publik mampu meningkatkan produktivitas sektor swasta dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, (C. Li et al., 2017) menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih, energi, dan transportasi, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menganalisis hubungan antarvariabel tersebut secara parsial, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun ketimpangan pendapatan secara terpisah. Selain itu, penelitian yang mengkaji pengaruh infrastruktur dan pembangunan ekonomi terhadap kedua variabel tersebut secara simultan masih belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan indikator akses air minum layak konsumsi sebagai proksi infrastruktur serta PDRB per kapita sebagai indikator pembangunan ekonomi untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Apakah pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Apakah infrastruktur berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Apakah pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
5. Apakah infrastruktur dan pembangunan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh pembangunan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

5. Menganalisis pengaruh infrastruktur dan pembangunan ekonomi secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan pemerataan pendapatan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi regional, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pendapatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan rujukan dalam pengembangan penelitian yang lebih luas mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh infrastruktur dan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Infrastruktur diukur menggunakan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih, sedangkan pembangunan ekonomi diukur menggunakan PDRB per kapita. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB dan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio.

Objek penelitian adalah Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Periode penelitian dibatasi pada tahun 2018–2025 dan dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan regresi regresi time series (OLS) agar penelitian lebih terarah dan fokus.